JURNAL EKONOMI DAN BISNIS

Journal homepage: www.ejournal.uksw.edu/jeb

ISSN 1979-6471 E-ISSN 2528-0147

Modal sosial dan kemiskinan di Jawa Barat

Bayu Kharisma^{a*}, Sutyaastie Soemitro Remi^b, Adhitya Wardhana^c, Deni Minarso^d

^a Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia;

bayu.kharisma@unpad.ac.id*

^b Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia;

sutyaastie.remi@unpad.ac.id

^c Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia;

adhitya.wardhana@unpad.ac.id

^d Badan Pusat Statistik, Kabupaten Bandung Barat, Indonesia;

denim.bps3217@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Artikel dikirim 10-02-2020

Revisi 03-06-2020

Artikel diterima 22-09-2020

Keywords:

Social capital, poverty,
instrumental variable

Kata Kunci:

Modal sosial, kemiskinan,
variabel instrumen

ABSTRACT

This article aims to analyze the effects of social capital on poverty in West Java Province. The data is generated from the results of the 2014 National Socioeconomic Survey (SUSENAS – Survei Sosial Ekonomi Nasional). The measures of social capital are mutual trust, tolerance, group, and networks. This study uses two instrument variables, namely length of residence and residence location to mitigate the endogeneity problem by using the Instrumental Variable Probit (IVP) estimation model. The results show that social capital negatively and significantly affects poverty. Furthermore, length of education as a proxy of human capital also significantly reduces the likelihood that a household becomes poor. Based on the findings, it is crucial that besides improving the infrastructure quality and providing financial assistance for education, governmental agencies in West Java Province facilitate poor households to participate socially and encourage the development of social organizations for the development of social capital as efforts to alleviate poverty in West Java Province.

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh modal sosial terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Barat. Data penelitian ini berasal dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dilakukan pada tahun 2014. Dalam penelitian ini, variabel modal sosial diwakili oleh empat konsep, yaitu saling percaya, toleransi, kelompok, dan jaringan. Selain itu, studi ini juga menggunakan dua variabel instrumen, yaitu lama tinggal dan lokasi tempat tinggal untuk mengoreksi masalah endogenitas dengan menggunakan model estimasi *Instrumental Variable Probit (IVP)*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa modal sosial mempengaruhi kemiskinan secara negatif dan signifikan. Selain itu, lama pendidikan sebagai proksi

*Penulis Korespondensi

modal manusia juga secara signifikan mengurangi kemungkinan suatu rumah tangga menjadi miskin. Berdasarkan temuan tersebut, selain meningkatkan kualitas infrastruktur dan memberikan bantuan keuangan untuk pendidikan, lembaga pemerintah di wilayah Jawa Barat juga diharapkan memfasilitasi rumah tangga miskin untuk berpartisipasi secara sosial dan mendorong pengembangan organisasi sosial untuk pengembangan modal sosial dalam upaya untuk mengentaskan kemiskinan di Provinsi Jawa Barat.

PENDAHULUAN

Pada dasarnya kemiskinan merupakan permasalahan pembangunan, terutama di negara-negara berkembang (Todaro & Smith, 2012). Kemiskinan dianggap salah satu ukuran capaian pembangunan di berbagai negara yang tertuang dalam *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang telah disepakati oleh 193 negara pada September 2015 (Hardiana, 2018). Tujuan *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang paling diprioritaskan adalah penanggulangan kemiskinan dan kelaparan dengan sasaran mengurangi kemiskinan (Sachs, 2012; United Nations, 2019). Sementara itu, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menurunkan tingkat kemiskinan pada tahun 2019 menjadi sebesar 7 sampai 8 persen (Bappenas RI, 2015). Pada 2000-2016, jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami penurunan dari 38,70 juta orang tahun 2000 menjadi 28,01 juta orang pada tahun 2016 dengan rata-rata penurunan sekitar 0,67 juta orang per tahun. Sementara itu, persentase penduduk miskin juga menurun dari 19,14 persen pada tahun 2000 menjadi 10,86 persen tahun 2016 atau mengalami penurunan 0,52 persen per tahun (perubahan absolut).

Tabel 1
Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
Provinsi Jawa Barat Menurut Status Daerah
Maret 2015 - September 2015

Status Daerah/ Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)		Total	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin (%)
	Makanan	Bukan Makanan			
Perkotaan					
Mar-15	213.479	94.009	307.488	2.638.383	8,43
Sep-15	223.843	94.454	318.297	2.706.520	8,58
Perdesaan					
Mar-15	231.259	74.358	305.617	1.797.316	11,82
Sep-15	241.132	78.096	319.228	1.779.134	11,61
Perkotaan + Perdesaan					
Mar-15	219.290	87.586	306.876	4.435.699	9,53
Sep-15	229.494	89.107	318.601	4.485.654	9,57

Sumber : Badan Pusat Statistik (2015)

Salah satu permasalahan kemiskinan di Indonesia adalah efektivitas program penanggulangan kemiskinan yang belum optimal (Nasution, Rustiadi, Juanda, & Hadi, 2014). Pada dasarnya, pemerintah sendiri telah menyusun kebijakan yang menjadi acuan dalam penanggulangan kemiskinan di daerah. Kebijakan ini sudah mengatur secara teknis

bahwa percepatan penanggulangan kemiskinan untuk mencapai target yang diharapkan dalam RPJMN yaitu penurunan angka kemiskinan sebesar 6-8 persen pada tahun 2015-2019. Meskipun begitu, program-program penanggulangan kemiskinan, baik di tingkat nasional maupun regional tersebut masih berjalan kurang terkoordinasi, sehingga tingkat kemiskinan maupun kesenjangan belum membaik (Litaniawan & Suasana, 2014). Hal tersebut juga terjadi di Jawa Barat yang masih memiliki tingkat kemiskinan dan kesenjangan pendapatan yang tinggi. Secara lebih rinci, jumlah penduduk miskin mencapai 4,44 juta orang atau sekitar 9,53 persen pada Maret 2015, seperti terlihat pada Tabel 1.

Sejauh ini, Provinsi Jawa Barat cenderung lebih mengandalkan pendekatan ekonomi dalam penanggulangan kemiskinan, misalnya pembangunan infrastruktur, bantuan kredit dan bantuan pendidikan dan kesehatan. Padahal kemiskinan merupakan persoalan kompleks yang melibatkan faktor lainnya, termasuk modal sosial (Gannon & Roberts, 2020). Oleh karena itu, implementasi program pengentasan kemiskinan tidak sepenuhnya efektif karena banyaknya faktor yang berpengaruh. Byres (2006) mengidentifikasi bahwa berbagai faktor yang menyebabkan belum optimalnya program pengentasan kemiskinan yaitu: (1) pendekatan yang bersifat *top-down*, (2) melupakan *local wisdom* dan *outsiders*, (3) minimnya keikutsertaan masyarakat, (4) tidak komprehensif, dan (5) lebih mementingkan aspek ekonomi. Sementara itu, pada umumnya program-program penanggulangan kemiskinan saat ini masih sebatas pada infrastruktur dan penyaluran bantuan. Namun, pada tahun 2007, Pemerintah Indonesia memperluas program pengurangan kemiskinan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) dengan menitikberatkan pada potensi sumberdaya manusia, pembangunan ekonomi lokal, dan pentingnya peran modal sosial (Litaniawan & Suasana, 2014).

Tabel 2
Perbandingan Komponen Indeks Modal Sosial Indonesia
dan Provinsi Jawa Barat, 2014

Komponen Modal Sosial	Indonesia	Jawa Barat	Selisih
Indeks Modal Sosial	49,45	48,10	-1.35
Sikap Percaya	60,87	61,64	0.77
Toleransi Agama	41,55	36,51	-5.04
Toleransi Suku	58,22	58,16	-0.06
Partisipasi dalam kelompok	49,08	48,19	-0.89
Jejaring	13,46	10,41	-3.05
Aksi Bersama	52,62	51,25	-1.37
Resiprinitas	53,15	52,71	-0.44

Sumber: Badan Pusat Statistik (2017)

Sementara itu, pencapaian indeks modal sosial di Jawa Barat masih di bawah angka nasional dengan rincian seperti yang tertera di Tabel 2. Pada Tabel 2, terlihat bahwa dari tujuh komponen modal sosial, sikap percaya Jawa Barat yang berada di atas rata-rata nasional, sedangkan enam komponen modal sosial lainnya yaitu toleransi agama dan suku, partisipasi dalam kelompok, jejaring, aksi bersama, dan resiprinitas masih berada di bawah rata-rata nasional. Hal ini menunjukkan bahwa enam komponen modal sosial di

Jawa Barat menjadi perhatian bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat agar dapat ditingkatkan di masa yang akan datang.

Pembentukan modal sosial telah diyakini sebagai solusi dalam persoalan pembangunan, misalnya kemiskinan, keterbelakangan ekonomi dan pemerintahan yang tidak efisien. Tenzin, Otsuka, dan Natsuda (2015) mengungkapkan bahwa modal sosial berkontribusi positif terhadap pengurangan kemiskinan di Bhutan. Modal sosial berperan sebagai jembatan bagi masyarakat untuk memperoleh akses sumber daya produktif seperti kredit bank dengan jaringan sosial guna menurunkan tingkat kemiskinan (Van Rijn, Bulte, & Adekunle, 2012). Peran modal sosial cukup krusial terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga dan penurunan kemiskinan (Zhang, Anderson, & Zhan, 2011). Zang, Zhou, dan Lei (2017) menunjukkan bahwa sifat struktural dan jaringan sosial rumah tangga pada jenis sumber daya yang tertanam dalam ikatan bisnis, ikatan politik, dan organisasi sosial dapat berkontribusi signifikan terhadap pengurangan kemiskinan.

Bertitik tolak dari permasalahan kemiskinan di Provinsi Jawa Barat dan berbagai penelitian sebelumnya, penting untuk meneliti peran modal sosial dalam analisis kemiskinan di provinsi tersebut. Untuk itu penelitian ini berusaha untuk melihat pengaruh modal sosial terhadap kemiskinan rumah tangga, khususnya di Provinsi Jawa Barat. Kontribusi penelitian ini adalah penggunaan model ekonometrika *Instrumental Variable Probit (IVP)* untuk mengatasi masalah endogenitas melalui variabel lama tinggal dan lokasi wilayah tempat tinggal rumah tangga. Dalam hal ini, modal sosial merupakan variabel endogen dalam model kemiskinan sehingga penerapan metode kuadrat terkecil (*OLS*) akan bias. Upaya mitigasi masalah endogenitas ini dengan menggunakan variabel yang diinstrumentasi melalui lama tinggal dan lokasi wilayah tempat tinggal rumah tangga belum pernah dilakukan di Indonesia, termasuk pada tingkat daerah.

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Konsep Kemiskinan

Pada dasarnya ada tiga konsep mengenai kemiskinan, yaitu subsisten, kebutuhan dasar, dan deprivasi relatif (Shorrocks & Townsend, 1980). Konsep subsisten mengacu pada kondisi saat pendapatan individu atau rumah tangga tidak cukup memenuhi kebutuhan fisik hidup minimum. Sementara itu, konsep kebutuhan dasar yaitu untuk mempertahankan hidup dengan tercukupinya makanan, perumahan dan pakaian, dan peralatan serta perlengkapan rumah tangga. Selain itu, konsep ini juga mengacu pada kebutuhan lainnya seperti air minum, sanitasi, angkutan umum, pelayanan kesehatan, serta fasilitas pendidikan dan budaya. Sementara itu, kemiskinan deprivasi relatif lebih komprehensif dan menyangkut aspek sosial. Dalam deprivasi relatif, pendekatan ambang pendapatan berdasarkan jenis dan jumlah keluarga pada seluruh tingkat (individu, keluarga, dan masyarakat), analisis kebutuhan, termasuk terhadap jumlah dan sumber pendapatan. Perbedaan jenis kelamin, ras, dan umur dapat mendorong tidak meratanya distribusi sumberdaya dan permintaan keluarga tertentu atau masyarakat.

Kajian teoritis tentang konsep kemiskinan secara mendalam dilakukan oleh Laderchi dan Savastano (2013) yang mengklasifikasikan definisi dan pengukuran kemiskinan dalam empat perspektif. Pertama, pendekatan moneter. Pendekatan ini mendefinisikan dan mengukur kemiskinan sebagai kekurangan individu untuk mencapai tingkat konsumsi (pendapatan) minimum yang diukur berdasarkan garis kemiskinan (GK). Kedua, pendekatan kemampuan yang menganggap bahwa pembangunan merupakan peningkatan kemampuan manusia dan bukan hanya sebatas peningkatan pendapatan. Dengan demikian, pendekatan ini mengoreksi konsep pendekatan moneter dan menitikberatkan pada kebebasan. Dalam hal ini, kemiskinan didefinisikan sebagai kehilangan (*deprivation*) kemampuan atau kegagalan individu untuk mencapai kemampuan dasar. Ketiga, pendekatan pengucilan sosial. Pendekatan ini populer di negara-negara industri atau maju (*industrialized countries*) yang mengalami proses marjinalisasi dan pencabutan hak-hak dasar ekonomi. Keempat, perspektif metode partisipatif. Pada umumnya, kemiskinan didefinisikan oleh pihak luar tanpa melihat dari perspektif orang miskin sendiri. Pendekatan ini awalnya ditawarkan oleh Byres (2006) untuk mengubah pola pikir para pengambil keputusan dalam mendefinisikan kelompok miskin dan besaran (*magnitude*) kemiskinan.

Konsep Modal Sosial

Menurut teori ekonomi dan sosiologi, modal sosial dipandang secara eksplisit sebagai konsep multidimensional. Modal sosial berbeda dari jenis modal lain dan merupakan sumberdaya yang dimiliki oleh individu dan kelompok. Modal sosial merupakan dimensi sosial dari paradigma pembangunan berkelanjutan yang mencoba mengintegrasikan tiga dimensi: sosial, ekonomi dan lingkungan. Selain itu, posisi modal sosial juga berperan positif dalam dimensi politik karena mendorong partisipasi, aksesibilitas, dan kebebasan masyarakat yang juga menjadi prinsip dalam paradigma pembangunan inklusif berkelanjutan (Fathy, 2019).

Lin, Cook, dan Burt (2017) menyatakan bahwa pendekatan tersebut bertujuan mengisi kekosongan pada kerangka pikir neoklasik yang mengemukakan fakta tentang konsepsi individu dalam kelompok sosial. Selain itu, teori modal sosial memasukkan analisis tentang keputusan individu dan sosial, kecenderungan individu untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama (*collective action*). Adanya kerja sama tersebut secara tidak langsung akan mengurangi biaya transaksi (*transaction cost*) dalam mencapai tujuan bersama.

Coleman (2009) menggunakan pendekatan fungsional untuk mendefinisikan modal sosial yang mengemukakan dalil bahwa fungsi dari beberapa bagian organisasi sosial adalah untuk melindungi dan memberi manfaat sosial-ekonomi bagi anggota. Selain itu, modal sosial dapat dihasilkan dan organisasi sosial yang terbangun dinamakan sebagai organisasi atau perkumpulan vertikal atau horisontal. Perkumpulan vertikal dicirikan sebagai hubungan hirarkis dengan perbedaan distribusi kewenangan di antara anggotanya, sedangkan perkumpulan horisontal merujuk kepada ikatan ke samping diantara individu yang memiliki kondisi struktur kewenangan yang sama dalam

komunitas. Dengan kata lain, individu dalam hubungan organisasi horisontal memiliki kewenangan dan tingkat yang sama.

Bourdieu (2018) memperkenalkan konsep modal sosial dalam konteks perdebatan bentuk-bentuk modalitas tersebut dengan melihat peluangnya untuk dikonversikan. Menurut Bourdieu (2018), bukan hanya modal ekonomi yang mudah dikonversikan ke dalam bentuk uang. Modal budaya pada situasi tertentu juga dapat dikonversikan menjadi modal yang memiliki nilai ekonomi. Halupnicek (2010) berpendapat bahwa ada ketegangan dalam sosiologi antara modal sosial sebagai aset individu dan pentingnya konteks sosialnya. Conley dan Udry (2010) menunjukkan bahwa perlu untuk memahami jumlah dan jenis modal sosial, khususnya jaringan (*networking*) yang dimiliki oleh kalangan petani di Ghana. Demikian pula, Videras, Owen, Conover, dan Wu (2012) menunjukkan bahwa jenis (bukan hanya jumlah) hubungan sosial penting untuk memahami penentu perilaku yang memperhatikan lingkungan.

Abdelhak, Sulaiman, dan Mohd (2012) menyatakan bahwa norma-norma dan aturan yang diprakarsai oleh tokoh masyarakat cenderung menarik rumah tangga kaya untuk bergabung. Hal ini menunjukkan bahwa modal sosial memberi manfaat ekonomi bagi rumah tangga miskin yang berpartisipasi dalam kelompok yang memiliki tingkat sosial-ekonomi yang heterogen. Weaver dan Habibov (2012) menunjukkan bahwa bentuk jejaring dan dukungan sosial berhubungan positif dengan pendapatan individu dan negatif terhadap tingkat kemiskinan. Modal sosial yang didefinisikan sebagai partisipasi dalam kegiatan sosial berdampak positif terhadap pengeluaran rumah tangga dan karena itu mengurangi kemiskinan. Sementara itu, penelitian lainnya menunjukkan bahwa peran modal sosial berpengaruh positif terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga dan penurunan kemiskinan (Zhang *et al.*, 2011). Berdasarkan kajian empiris tersebut maka hipotesis penelitian ini memprediksi adanya pengaruh negatif antara modal sosial dengan tingkat kemiskinan. Dengan demikian, hipotesis yang dibuat sebagai berikut:

H1: Modal sosial berpengaruh negatif terhadap kemiskinan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yaitu Modul Sosial Budaya dan Pendidikan tahun 2014 yang melakukan pengukuran modal sosial dengan menggunakan pendekatan ukuran indeks (empat dimensi), yaitu (1) rasa saling percaya (*trust*), (2) toleransi (*tolerance*), (3) kelompok (*group*), dan (4) jejaring (*network*). Kemiskinan rumah tangga dalam penelitian ini dibatasi pada ketidakmampuan dari sisi ekonomi dalam mencapai tingkat kesejahteraan tertentu yang diproksi oleh pengeluaran per kapita dan kemiskinan rumah tangga (Badan Pusat Statistik, 2018). Dalam hal ini, tingginya pengeluaran per kapita rumah tangga secara tidak langsung dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Selanjutnya, rumah tangga miskin adalah yang memiliki pengeluaran per kapita dibawah Garis Kemiskinan (GK). Model dasar yang digunakan dalam penelitian ini mengadopsi penelitian Grootaert dan Narayan (2004).

$$y_i^* = \beta_0 + \sum_{j=1}^k \beta_j x_{ji} + \varepsilon_i \dots\dots\dots 1$$

Pada persamaan (1), y^* tidak dapat diukur secara langsung karena merupakan variabel laten (*unobserved variable*). Variabel y^* diukur dengan menggunakan klasifikasi kemiskinan rumah tangga sampel. Klasifikasi kemiskinan rumah tangga terdiri atas miskin atau tidak miskin. Oleh karena itu, nilai y_i memiliki skala diskrit, dengan ketentuan sebagai berikut:

$$y_i = 1 \text{ if } y^* > 0 \text{ and } 0 \text{ if } y^* \leq 0 \dots\dots\dots 2$$

dengan mengacu pada persamaan (2), maka probabilitas kemiskinan rumah tangga yaitu:

$$Pr(y_i = 1|x) = \Psi(y_i^*) \dots\dots\dots 3$$

$\Psi(.)$ merupakan *cumulative distribution function*. Model logit mengasumsikan bahwa *cumulative distribution function* berdistribusi logistik, sehingga dapat dituliskan:

$$Pr(y_i = 1|x) = \frac{\exp(\beta_0 + \sum_{j=1}^k \beta_j x_{ji})}{1 + (\beta_0 + \sum_{j=1}^k \beta_j x_{ji})} \dots\dots\dots 4$$

Berdasarkan persamaan (1), (2), (3) dan (4), maka model dalam penelitian ini menjadi:

$$dMiskin_i = \beta_0 + \beta_1 MS_i + \beta_2 D_i + \beta_3 SE_i + \mu_i \dots\dots\dots 5$$

$$\text{di mana } MS_i = \pi_0 + \pi_1 Z_{i1} + \pi_2 Z_{i2} + \pi_3 X_{i1} + \pi_4 X_{i2} + v \dots\dots\dots 6$$

di mana $dMiskin_i$ adalah status kemiskinan rumah tangga, D_i adalah karakteristik demografi, SE_i adalah karakteristik sosial- ekonomi, Z adalah variabel instrumen, dan μ_i *error term*.

Grootaert dan Bastelaer (2002) merekomendasikan tiga jenis indikator modal sosial pada level mikro. Indikator tersebut terdiri atas sikap percaya dan kepatuhan terhadap norma, keanggotaan dalam perkumpulan atau jejaring lokal, dan tindakan bersama. Dalam penelitian ini, modal sosial didekati dengan empat dimensi, yaitu rasa percaya (*trust*), toleransi (*tolerance*), keanggotaan dalam kelompok (*group*), dan jejaring (*network*).

Setiap dimensi modal sosial diukur dengan menggunakan indeks berdasarkan indikator pada masing-masing dimensi. Semua indikator pada setiap dimensi dikonversi menjadi variabel dikotomis yang hanya memerlukan jawaban "ya" atau "tidak" (bernilai satu jika ya dan nol sebaliknya). Untuk mendapatkan indeks setiap dimensi setiap rumah tangga dihitung persentase frekuensi jawaban "ya" (atau nilai satu) dan hasilnya berubah menjadi skala dari nol sampai 100, dengan formula sebagai berikut (Jumirah & Wahyuni, 2018):

$$I_{DMS_{ji}} = \frac{\text{Indikator(kode 1)}_{ji}}{\sum \text{Indikator}_j} \times 100 \dots\dots\dots 7$$

di mana I_DMS_{ji} adalah indeks dimensi modal sosial, indikator (kode 1) $_{ji}$ yaitu indikator yang berkode 1 dimensi ke-j rumah tangga ke-i, $\sum Indikator_j$ adalah banyaknya indikator dimensi ke-j dan j yaitu modal sosial (1=saling percaya; 2=toleransi; 3=kelompok; 4=jejaring). Adapun berbagai ringkasan definisi dan pengukuran variabel dilihat di Tabel 3 (Lampiran).

Modal sosial merupakan variabel endogen dalam model kemiskinan. Untuk itu penerapan *OLS* biasa tidak cocok dapat menghasilkan estimator yang bias dan tidak konsisten karena variabel endogen berkorelasi dengan gangguan. Penerapan model *OLS* tanpa mengoreksi endogenitas akan menyebabkan estimator bias dan tidak konsisten, sehingga akan menghasilkan kesimpulan yang salah (Adepoju & Oni, 2012; Hassan & Birungi, 2011). Salah satu cara untuk mengatasi endogenitas adalah penggunaan estimasi variabel instrumental. Metode ini merupakan suatu prosedur untuk menduga parameter persamaan struktural yang *overidentified* (Wooldridge, 2015).

Penerapan metode *Instrumental Variable Probit (IVP)* adalah estimasi variabel instrumental untuk mengisolasi dampak endogen modal sosial terhadap kemiskinan rumah tangga. Penelitian ini menggunakan dua *instrumental variable*, yaitu lama tinggal dan lokasi wilayah tempat tinggal rumah tangga. Lama tinggal di daerah setempat memungkinkan masyarakat saling kenal yang dapat meningkatkan rasa percaya sebagai instrumen pembentuk modal sosial. Lama tinggal di daerah setempat berhubungan langsung dengan pengeluaran rumah tangga. Sementara itu, lokasi wilayah tempat tinggal rumah tangga memungkinkan terjadinya kondisi masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya dapat saling berinteraksi. Dalam hal ini, umumnya daerah perdesaan dengan tingkat mobilitas penduduk yang kurang padat memungkinkan individu dapat sering berinteraksi.

Variabel instrumen yang digunakan diharapkan sangat berkorelasi dengan modal sosial dan tidak berkorelasi dengan kemiskinan rumah tangga atau ketentuan atau persyaratan bahwa variabel tersebut (z) tidak berkorelasi dengan *error* (u) atau $cov(z, u) = 0$, dan variabel tersebut (z) berkorelasi dengan variabel tidak bebas (x) atau $Cov(z, x) \neq 0$ (Wooldridge, 2015).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Jenis data dalam penelitian ini adalah data *cross section* tingkat rumah tangga. Cakupan data sebesar 5.494 rumah tangga sampel yang berada di Provinsi Jawa Barat. Sementara itu, sampel yang berada di bawah garis kemiskinan provinsi Jawa Barat atau rumah tangga miskin sebanyak 382 rumah tangga (6,95 persen), sedangkan yang di atas garis kemiskinan atau dikategorikan rumah tangga tidak miskin sebanyak 5.112 sampel. Selanjutnya, garis kemiskinan yang digunakan pada tingkat provinsi (Tabel 4 Lampiran).

Tabel 5 menunjukkan bahwa 80 persen kepala rumah tangga berjenis kelamin laki-laki, baik pada rumah tangga miskin maupun tidak miskin. Rata-rata umur kepala rumah tangga yang berkategori miskin adalah 49,29, sedangkan umur kepala rumah

tangga yang tidak berkategori miskin lebih rendah, yaitu 49,10. Kepala rumah tangga miskin memiliki rata-rata lama sekolah yang lebih rendah atau sebesar 5,73 dibanding kepala rumah tangga tidak miskin dengan rata-rata lama sekolah 7,43. Jumlah anggota rumah tangga yang lebih besar banyak dijumpai pada rumah tangga miskin yaitu sejumlah 4,34. Pada umumnya lapangan usaha (pekerjaan utama) kepala rumah tangga miskin di sektor pertanian sebesar 96 persen, yang sebagian besar berada di wilayah perdesaan. Adapun indeks modal sosial lebih besar dijumpai pada rumah tangga tidak miskin dibandingkan rumah tangga miskin.

Sementara itu, indeks rasa percaya rumah tangga miskin 90,05 unit (maksimal 100), relatif tinggi dibandingkan dengan rumah tangga tidak miskin sebesar 82,12 unit (Tabel 5). Selanjutnya, untuk tiga indeks sosial lainnya, yaitu toleransi, partisipasi dalam kelompok, dan jejaring sosial, rumah tangga tidak miskin memiliki nilai lebih tinggi daripada rumah tangga miskin.

Tabel 5
Indeks Modal Sosial Menurut Status Kemiskinan Rumah Tangga

Indeks	Status kemiskinan rumah tangga		
	Tidak miskin	Miskin	Total
Rasa percaya	82,12	90,05	86,09
Toleransi	55,51	49,08	52,30
Partisipasi dalam kelompok sosial	30,67	23,73	27,20
Jejaring sosial	64,61	63,61	64,11
Indeks modal sosial	58,23	56,62	57,43

Sumber: Data diolah dari Badan Pusat Statistik (2014)

Tabel 6 menunjukkan bahwa rumah tangga miskin cenderung mempunyai jumlah anggota rumah tangga yang lebih banyak. Indikasinya, lebih dari 20 persen rumah tangga miskin memiliki 6-9 anggota keluarga sementara hanya ada sekitar 7 persen rumah tangga tidak miskin yang memiliki anggota keluarga sebanyak itu.

Tabel 6
Persentase Ukuran Rumah Tangga Menurut Status Kemiskinan

Status kemiskinan	Ukuran Rumah Tangga				Jumlah
	< 3	3-5	6-9	> 9	
Miskin	14,14	64,92	20,94	-	100,00
Tidak miskin	27,13	65,40	7,37	0,10	100,00

Sumber: Data diolah dari Badan Pusat Statistik (2014)

Persentase tingkat pendidikan kepala rumah tangga miskin yang tidak menamatkan sekolah dasar lebih besar (28,8 persen) dibandingkan yang tidak miskin (19,54 persen) (lihat Tabel 7). Sementara itu, rata-rata lama sekolah kepala rumah tangga miskin di perkotaan lebih lama dibandingkan dengan di perdesaan, yaitu sebesar 6,12 tahun dibandingkan dengan 5,3 tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa rumah tangga miskin di perdesaan rata-rata tidak tamat sekolah dasar karena sarana dan prasarana fasilitas pendidikan di pedesaan yang tidak sebaik sarana sejenis di perkotaan (Badan Pusat Statistik, 2017).

Anggota rumah tangga miskin tidak bisa atau tidak mau bersekolah karena harus bekerja untuk bertahan hidup. Anyanwu (2013) menemukan bahwa anggota rumah tangga produktif tidak memiliki pendidikan formal atau hanya sampai sekolah dasar lebih mungkin menjadi miskin dibandingkan anggota rumah tangga produktif yang menyelesaikan sekolah menengah dan seterusnya di perdesaan India. Temuan ini mirip dengan di Jawa Barat, kondisi pendidikan berpengaruh negatif dengan tingkat kemiskinan (Susanti, 2016). Dengan demikian, peran pendidikan sangat penting karena dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Dalam hal ini, individu dengan pendidikan yang baik memiliki peluang yang lebih kecil untuk menjadi miskin.

Tabel 7
Persentase Tingkat Pendidikan Kepala Rumah Tangga Menurut Status Kemiskinan
Tingkat pendidikan kepala rumah tangga (%)

Status kemiskinan	Tidak Tamat SD	SD	SLTP	SLTA	PT	Jumlah
Miskin	28,80	52,62	14,66	2,62	1,31	100,00
Tidak miskin	19,54	35,37	29,12	7,23	8,74	100,00

Sumber: Data diolah dari Badan Pusat Statistik (2014)

Tabel 8 menunjukkan distribusi persentase laki-laki sebagai kepala rumah tangga miskin mencapai 84,03 persen, sedangkan pada rumah tangga tidak miskin tercatat 84,92 persen. Sementara itu, 84,55 persen rumah tangga miskin berstatus menikah dan 81,24 persen rumah tangga tidak miskin berstatus menikah. Kondisi ini telah menjadi fokus sejumlah penelitian sebelumnya di Jawa Barat yang menunjukkan bahwa kemiskinan yang dikepalai perempuan disebabkan adanya diskriminasi terhadap perempuan di pasar tenaga kerja sehingga mendapatkan gaji yang lebih rendah (Megasari & Purnastuti, 2016).

Tabel 8
Persentase Status Perkawinan dan Jenis Kelamin
Kepala Rumah Tangga Menurut Status Kemiskinan

Status kemiskinan	Status Perkawinan (%)			Jenis Kelamin KRT (%)		
	Kawin	Lainnya	Jumlah	L	P	Jumlah
Miskin	84,55	15,45	100,00	84,03	15,97	100,00
Tidak miskin	81,24	18,76	100,00	84,92	15,08	100,00

Sumber: Data diolah dari Badan Pusat Statistik (2014)

Sementara itu, kepala rumah tangga miskin yang bekerja di sektor pertanian sebesar 96,07 persen, selebihnya (3,93 persen) bekerja di sektor lainnya (Tabel 9). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kepala rumah tangga miskin banyak menitikberatkan pendapatannya dari sektor pertanian. Selain itu, hal yang menarik adalah 99,21 persen rumah tangga miskin memiliki rumah milik sendiri.

Tabel 9
Persentase Status Kepemilikan Rumah dan Lapangan Usaha
Menurut Status Kemiskinan

Status kemiskinan	Status Rumah		Lapangan Usaha			
	Milik Sendiri	Bukan Milik Sendiri	Jumlah	Pertanian	Lainnya	Jumlah
Miskin	99,21	0,79	100,00	96,07	3,93	100,00
Tidak miskin	89,65	10,35	100,00	97,59	2,41	100,00

Sumber: Data diolah dari Badan Pusat Statistik (2014)

Sebelum melakukan estimasi, permasalahan yang mungkin muncul dalam pendugaan modal sosial terhadap kemiskinan adalah masalah endogenitas. Dengan demikian, untuk memastikan tidak adanya endogenitas maka dilakukan pengujian endogenitas menggunakan uji *Durbin Wu-Hausman* (Wooldridge, 2015) dan *Wald Test* untuk metode *Instrumental Variable Probit* (IVP). Hasil pengujian *Wald* tentang eksogenitas signifikan pada tingkat kepercayaan 99 persen (hasil tidak ditabulasi). Artinya, variabel modal sosial adalah variabel endogen. Pengujian endogenitas diperlukan karena penggunaan variabel instrumen dan pendugaan dengan metode *OLS* yang tidak tepat akan menghasilkan pendugaan yang tidak efisien (memiliki varians yang besar). Hipotesis nol menunjukkan bahwa variabel modal sosial adalah eksogen dalam model pendugaan kemiskinan. Selanjutnya, dalam upaya untuk menganalisa pengaruh modal sosial terhadap kemiskinan dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu metode *OLS* dan *Instrumental Variable Probit* (IVP).

Tabel 10 (Lampiran) menunjukkan hasil estimasi pengaruh komponen modal sosial (saling percaya, toleransi, kelompok, dan jaringan) terhadap status kemiskinan rumah tangga di Jawa Barat. Hasil pendugaan menunjukkan bahwa komponen modal sosial saling percaya dan toleransi signifikan mempengaruhi kemungkinan rumah tangga menjadi miskin. Secara lebih rinci, komponen saling percaya berpengaruh positif, sedangkan toleransi berlawanan terhadap peluang rumah tangga menjadi miskin. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menganalisis hal diatas. Namun, sebagai gambaran, karakteristik rumah tangga miskin yang dijadikan sampel Susenas rata-rata bekerja pada sektor pertanian di daerah perdesaan yang memiliki tingkat kepercayaan lebih tinggi dari perkotaan. Sementara itu, dua indikator modal manusia yakni rata-rata lama sekolah dan status kesehatan memiliki arah pengaruh yang berlawanan. Lama sekolah memiliki pengaruh signifikan dan negatif, sementara status kesehatan tidak signifikan.

Kepercayaan memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap tingkat kemiskinan. Dalam hal ini, kepercayaan sangat membantu dalam proses pembangunan wilayah pada pemerintahan tingkat lokal (dalam hal ini Provinsi Jawa Barat). Program pembangunan pemerintah akan lebih efektif jika masyarakat yang memiliki tingkat kepercayaan yang kuat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, adanya program pembangunan yang melibatkan partisipasi penduduk akan lebih optimal dan tepat sasaran. Masyarakat yang

memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi sangat membantu dalam menjalankan perannya.

Selanjutnya, pengaruh modal manusia dan agregat modal sosial (gabungan dari komponen modal sosial) terhadap kemiskinan menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah dan kesehatan yang diwakili oleh status kesehatan memberikan hasil yang berbeda. Dalam hal ini, nilai koefisien rata-rata lama sekolah secara statistik signifikan tetapi status kesehatan tidak signifikan. Adapun pendugaan koefisien modal sosial secara statistik tidak signifikan. Artinya tidak dapat disimpulkan pengaruh kesehatan sebagai modal manusia terhadap status kemiskinan rumah tangga dan modal sosial. Sementara itu, berbagai variabel bebas lain yang berpengaruh terhadap status kemiskinan dan secara signifikan pada tingkat kepercayaan satu persen adalah jenis kelamin, ukuran rumah tangga dan status kepemilikan rumah. Sementara itu, hasil estimasi lainnya menunjukkan bahwa pengaruh indeks modal sosial terhadap status kemiskinan rumah tangga tidak dapat disimpulkan. Hasil temuan yang tidak konsisten ini diduga akibat masalah endogenitas (Tabel 11).

Tabel 11
Pendugaan Dampak Modal Sosial dan Modal Manusia Terhadap
Peluang Rumah Tangga Menjadi Miskin dengan OLS/Logit

Variabel	Variabel tidak bebas: miskin (1=miskin dan 0= tidak miskin)		
	Koef.	Z	Signifikan
Indeks modal sosial	-0,0053335	-1,40	0,162
Lama sekolah	-0,1618413***	-8,26	0,000
Status Kesehatan	0,0565202	0,37	0,708
Jenis kelamin (1=laki-laki)	-0,7972288***	-2,64	0,008
Umur	-0,0106305**	-2,22	0,026
Status perkawinan (1=kawin)	0,5214149*	1,69	0,091
Ukuran rumah tangga	0,4317336 ***	12,21	0,000
Pekerjaan utama (1=pertanian)	-0,2717404	-0,94	0,347
Status rumah (1=milik sendiri)	2,035739***	3,46	0,001
Konstanta	-3,837506***	-5,01	0,000
Jumlah observasi		5474	
<i>Wald test of exogeneity</i>			
<i>chi²</i>		284,66	
<i>Prob > chi²</i>		0,0000	

Sumber: Data diolah dari Badan Pusat Statistik (2014)

Keterangan: *** signifikan pada tingkat 1%, ** signifikan pada tingkat 5%, * signifikan pada tingkat 10%

Kepala atau anggota rumah tangga yang tergabung dalam kegiatan sosial seringkali membutuhkan waktu luang dan membayar iuran atau biaya lainnya. Akibatnya, rumah tangga miskin mengalami kesulitan berpartisipasi dalam kelompok sosial. Di sisi lain, partisipasi dalam kelompok sosial cenderung meningkat dengan seiring dengan meningkatnya pengeluaran/pendapatan. Pengeluaran per kapita rumah tangga memiliki efek umpan balik terhadap partisipasi dalam kelompok sosial (modal sosial) pada rumah tangga sehingga ada kemungkinan terjadinya masalah endogenitas (Adepoju & Oni, 2012).

Adanya masalah endogenitas modal sosial terhadap kemiskinan mengakibatkan analisis sulit memperkirakan besaran dan arah pengaruh modal sosial terhadap kemiskinan. Dalam kasus adanya masalah endogenitas, pendugaan dengan menggunakan metode *OLS* akan bias dan tidak konsisten walaupun jumlah pengamatan ditingkatkan. Pada bagian selanjutnya, dilakukan pendugaan dengan mengatasi masalah endogenitas. Secara lebih rinci, penelitian ini menggunakan pendekatan metode pendugaan variabel instrumen (*instrumental variable*) dan pendugaan dua tahap (*two probit least squares*). Pemilihan pendekatan ini mengikuti penelitian sebelumnya yang menggunakan beberapa variabel instrumen untuk mengoreksi efek endogenitas modal sosial terhadap kemiskinan. Penelitian ini menganalisis dua variabel instrumen, yaitu lama tinggal dan lokasi wilayah tempat tinggal rumah tangga.

Tabel 12 memperlihatkan hasil estimasi modal sosial yang diinstrumentasikan dengan lama tinggal rumah tangga dan lokasi wilayah tempat tinggal terhadap status kemiskinan rumah tangga di Jawa Barat. Penilaian kecocokan model dengan menggunakan *Wald Test* ($Prob > \chi^2 < 0,05$) menunjukkan bahwa modal sosial terbukti endogen terhadap status kemiskinan rumah tangga. Sementara itu, indeks modal sosial secara signifikan mempengaruhi status kemiskinan rumah tangga di Jawa Barat. Hal ini mengindikasikan bahwa akumulasi modal sosial berkaitan dengan penurunan kemungkinan rumah tangga menjadi miskin di Jawa Barat. Hasil ini mendukung dan konsisten dengan penelitian Gannon dan Roberts (2020).

Sementara itu, lama sekolah berpengaruh negatif terhadap peluang rumah tangga jatuh ke dalam kemiskinan. Dalam hal ini, pendidikan sebagai pembentuk modal manusia akan meningkatkan akses rumah tangga terhadap informasi baru dan kemampuan mengolah informasi tersebut, sehingga memberikan kesempatan kerja yang lebih luas dan memengaruhi peningkatan pendapatan. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya di Brazil yang menunjukkan bahwa tingkat pendidikan kepala rumah tangga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan (Nakabashi, 2018).

Kepala rumah tangga laki-laki cenderung lebih sejahtera dibanding kepala rumah tangga perempuan. Temuan ini sejalan dengan yang hasil penelitian di Uganda (Hassan & Birungi, 2011). Hal ini dikarenakan kepala rumah tangga laki-laki umumnya memiliki akses pada aset produktif sehingga lebih produktif dan secara tidak langsung dapat berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan.

Ukuran rumah tangga ditemukan berpengaruh positif dengan status kemiskinan. Hasil temuan ini menunjukkan bahwa apabila jumlah anggota rumah tangga bertambah akan memperbesar peluang rumah tangga menjadi miskin. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya (Adepoju & Oni, 2012; Grootaert, 1999; Hassan & Birungi, 2011; Tenzin *et al.*, 2015).

Selanjutnya, status kepemilikan rumah berpengaruh positif terhadap status kemiskinan. Hasil temuan ini mengindikasikan bahwa sebagian besar rumah yang dihuni oleh rumah tangga yang terdiri dari beberapa keluarga (dapur bersama) yang tinggal

bersama dalam satu rumah berpengaruh terhadap pengeluaran per kapita rumah tangga yang cenderung kecil, terutama di daerah perdesaan.

Tabel 12
Pendugaan Dampak Modal Sosial dan Modal Manusia
Terhadap Peluang Rumah Tangga Menjadi Miskin
dengan *Instrumental Variable Probit (IVP)*

Variabel	Variabel tidak bebas: miskin (1=miskin dan 0= tidak miskin)		
	Koef.	z	Signifikan
Indeks modal sosial	-0,0546000***	- 8,39	0,0000
Lama sekolah	-0,0461960***	-3,58	0,0000
Status Kesehatan	-0,0420463	-0,72	0,4740
Jenis kelamin (1=laki-laki)	-0,2763586**	-2,38	0,0170
Umur	-0,0003887	-0,21	0,8380
Status perkawinan (1=kawin)	0,0806813	0,71	0,4760
Ukuran rumah tangga	0,1530849***	5,36	0,0000
Pekerjaan utama (1=pertanian)	0,1768678	1,39	0,1650
Status rumah (1=milik sendiri)	0,3645206**	1,99	0,0470
Konstanta	0,8994000**	2,55	0,0110
Jumlah observasi		5474	
Wald test of exogeneity			
χ^2		923,22	
Prob > χ^2		0,0000	

Sumber: Data diolah dari Badan Pusat Statistik (2014)

Keterangan: *** signifikan pada tingkat 1%, ** signifikan pada tingkat 5%, * signifikan pada tingkat 10%

Tabel 13 menyajikan hasil pendugaan pengaruh modal sosial yang diinstrumentasi dengan lama tinggal dan lokasi wiayah tempat tinggal kepala rumah tangga (untuk mengatasi masalah endogenitas) terhadap peluang rumah tangga menjadi miskin. Hasil pendugaan indeks modal sosial, lama sekolah, jenis kelamin, ukuran rumah tangga, dan status kepemilikan rumah signifikan menjelaskan variasi kemiskinan. Sementara itu, hasil pendugaan koefisien status kesehatan, usia dan status pernikahan serta pekerjaan utama kepala rumah tangga tidak signifikan mempengaruhi kemiskinan. Hasil estimasi dengan metode *Instrumental Variable Probit (IVP)* menunjukkan bahwa lama sekolah dan modal sosial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Artinya, semakin besar nilai lama sekolah dan modal sosial maka semakin mengurangi jumlah kemiskinan dari suatu rumah tangga. Selanjutnya, jenis kelamin menunjukkan tanda negatif, berarti rumah tangga yang dikepalai oleh laki-laki lebih kecil kemungkinannya untuk miskin dibanding rumah tangga yang dikepalai perempuan. Adapun ukuran rumah tangga memiliki hubungan positif dengan kemiskinan.

Secara umum, hasil ini mendukung penelitian sebelumnya bahwa pengentasan kemiskinan tidak hanya terkait dengan kebutuhan ekonomi semata (Nasution, Rustiadi, Juanda, & Hadi, 2015), tapi juga perluasan akses terhadap modal sosial yaitu saling percaya, toleransi, partisipasi dalam kelompok, dan jejaring sosial. Sementara itu, pendidikan akan meningkatkan akses rumah tangga terhadap informasi baru sehingga memberikan kesempatan kerja lebih luas dan peningkatan pendapatan (Hassan & Birungi,

2011). Terakhir, jumlah anggota rumah tangga akan memperbesar peluang menjadi miskin karena bertambahnya jumlah tanggungan keluarga.

Tabel 13
Pendugaan Dampak Modal Sosial dan Modal Manusia
Terhadap Peluang Rumah Tangga Menjadi Miskin dengan
Instrumental Variable Probit (IVP)

Variabel	Variabel tidak bebas: miskin (1=miskin dan 0= tidak miskin)		
	Koef.	z	Signifikan
Indeks modal sosial	-0,0546007***	- 8.39	0,0000
Lama sekolah	-0,0461964***	-3,58	0,0000
Status Kesehatan	-0,0420463	-0,72	0,4740
Jenis kelamin (1=laki-laki)	-0,2763586**	-2,38	0,0170
Umur	-0,0003887	-0,21	0,8380
Status perkawinan (1=kawin)	0,0806813	0,71	0,4760
Ukuran rumah tangga	0,1530849***	5,36	0,0000
Pekerjaan utama (1=pertanian)	0,1768678	1,39	0,1650
Status rumah (1=milik sendiri)	0,3645206**	1,99	0,0470
Konstanta	0,8994000**	2,55	0,0110
Jumlah observasi		5474	
<i>Wald test of exogeneity</i>			
<i>chi²</i>		923,22	
<i>Prob > chi²</i>		0,0000	

Sumber: Data diolah dari Badan Pusat Statistik (2014)

Keterangan: *** signifikan pada tingkat 1%, ** signifikan pada tingkat 5%, * signifikan pada tingkat 10%

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Secara umum, modal sosial yang diinstrumentasi dengan lama tempat tinggal dan lokasi wilayah tempat tinggal rumah tangga berpengaruh negatif terhadap kemiskinan rumah tangga di Jawa Barat. Artinya, akumulasi modal sosial bersama-sama dengan faktor-faktor yang lain di tingkat rumah tangga berpengaruh negatif terhadap peluang rumah tangga menjadi miskin. Hasil temuan ini mengindikasikan modal sosial berkaitan dengan penurunan kemungkinan rumah tangga miskin. Hal ini memberikan bukti empiris bahwa modal sosial memiliki pengaruh pada penurunan peluang rumah tangga menjadi miskin.

Keberadaan modal sosial menjadi penting dalam penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat sehingga kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sebaiknya tidak hanya berfokus pada modal manusia, finansial, dan fisik tapi juga memperhatikan keberadaan aspek modal sosial di masyarakat. Akses terhadap modal sosial dapat memfasilitasi rumah tangga miskin dalam mengakses modal modal manusia, modal finansial, dan modal fisik (sumberdaya ekonomi) melalui perluasan jejaring sosial dan sikap saling percaya. Secara lebih rinci, implikasi kebijakan penelitian ini berfokus pada perlunya pengembangan dan pemanfaatan modal sosial dalam pengurangan kemiskinan dengan mempertimbangkan beberapa hal. Pertama, pemerintah perlu mendorong peningkatan dimensi atau komponen modal sosial yang masih rendah atau perlu ditingkatkan. Dalam hal ini, komponen modal sosial yang masih rendah di tingkat

rumah tangga di perdesaan adalah jejaring sosial dan partisipasi dalam kegiatan sosial. Perluasan jejaring sosial dan peningkatan partisipasi dalam kelompok sosial dapat dilakukan dengan cara mendorong rumah tangga berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan dan berkembangnya organisasi sosial di perdesaan. Kedua, perlunya peningkatan kebijakan-kebijakan pembangunan perdesaan di bidang pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya yang diharapkan berdampak pada penguatan kelembagaan lokal dan pengembangan modal sosial. Pengembangan modal sosial akan meningkatkan rasa saling percaya, sehingga akan meningkatkan kerjasama antara pemerintah daerah dan masyarakat setempat dalam menyukseskan program pengurangan kemiskinan. Ketiga, pengembangan modal sosial harus bersifat inklusif, sehingga rumah tangga miskin tetap dapat berpartisipasi dalam kegiatan sosial untuk pengembangan modal sosial (akses sosial) dan pengurangan kemiskinan rumah tangga perdesaan (akses ekonomi) di Provinsi Jawa Barat.

Terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini. Pertama, penelitian ini belum memperhitungkan indikator kesejahteraan rumah tangga dalam mengukur status kemiskinan rumah tangga. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut diharapkan dapat mengukur status kemiskinan rumah tangga dengan menggunakan indikator kesejahteraan rumah tangga. Kedua, penelitian ini menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional Modul Sosial Budaya dan Pendidikan Tahun 2014. Dengan demikian, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan data tahun 2018 untuk menggambarkan kondisi modal sosial saat ini di Jawa Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdelhak, S., Sulaiman, J., & Mohd, S. (2012). The role of assets in the enhancement of households' income: A study of poverty alleviation among rural communities of Kelantan and Terengganu. *Asian Social Science*, 8(11), 145–153. <https://doi.org/10.5539/ass.v8n11p145>
- Adepoju, A. A., & Oni, O. A. (2012). Investigating endogeneity effects of social capital on household welfare in Nigeria: A control function approach. *Quarterly Journal of International Agriculture*, 51(1), 1–24.
- Anyanwu, J. C. (2013). The correlates of poverty in Nigeria and policy implications. *African Journal of Economic and Sustainable Development*, 2(1), 23–52. <https://doi.org/10.1504/ajesd.2013.053053>
- Badan Pusat Statistik. (2014). *Statistics of social capital 2014* (Vol. 1). Jakarta: Central Bureau of Statistics.
- Badan Pusat Statistik. (2017). *Statistik modal sosial tahun 2017*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2018). Profil kemiskinan di Indonesia Maret 2018. In *Badan Pusat statistik*.

- Bappenas RI. (2015). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Bourdieu, P. (2018). The forms of capital. In *The Sociology of Economic Life* (3rd ed.). <https://doi.org/10.4324/9780429494338>
- Byres, T. J. (2006). Rural development: Putting the last first. *International Affairs*, 60(3), 477–478. <https://doi.org/10.2307/2617619>
- Chalupnicek, P. (2010). The capital in social capital: An Austrian perspective. *American Journal of Economics and Sociology*, 69(4), 1230–1250. <https://doi.org/10.1111/j.1536-7150.2010.00742.x>
- Coleman, J. S. (2009). Social capital in the creation of human capital. *American Journal of Sociology*, 9(Supplement), 95–120. <https://doi.org/10.1086/228943>
- Conley, T. G., & Udry, C. R. (2010). Learning about a new technology: Pineapple in Ghana. *American Economic Review*, 100(1), 35–69. <https://doi.org/10.1257/aer.100.1.35>
- Fathy, R. (2019). Modal sosial: Konsep, inklusivitas dan pemberdayaan masyarakat. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 6(1), 1–17. <https://doi.org/10.22146/jps.v6i1.47463>
- Gannon, B., & Roberts, J. (2020). Social capital: Exploring the theory and empirical divide. *Empirical Economics*, 58(1), 899–919. <https://doi.org/10.1007/s00181-018-1556-y>
- Grootaert, C. (1999). Social capital, household welfare and poverty in Indonesia. In *Local Level Institutions Study Social Development Department Environmentally and Socially Sustainable Development Network The World Bank*. <https://doi.org/10.1111/1467-9663.00036>
- Grootaert, C., & Bastelaer, T. van. (2002). *The role of social capital in development: An empirical assessment*. Cambridge University Press.
- Grootaert, C., & Narayan, D. (2004). Local institutions, poverty and household welfare in Bolivia. *World Development*, 32(7), 1179–1198. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2004.02.001>
- Hardiana, D. R. (2018). Implementasi sustainable development goals (SDGs) dalam pembangunan kota berkelanjutan di Jakarta. In *Jusuf Kalla School of Government*.
- Hassan, R., & Birungi, P. (2011). Social capital and poverty in Uganda. *Development Southern Africa*, 28(1), 19–37. <https://doi.org/10.1080/0376835X.2011.545168>
- Jumirah, & Wahyuni, H. (2018). The effect of social capital on welfare in Indonesia. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 33(1), 65–76. <https://doi.org/10.22146/jieb.29219>
- Laderchi, C. R., & Savastano, S. (2013). *Poverty and exclusion in the Western Balkans:*

- New directions in measurement and policy* (S. Ruggeri Laderchi, Caterina, Savastano, Ed.). <https://doi.org/10.1007/978-1-4614-4945-4>
- Lin, N., Cook, K. S., & Burt, R. S. (2017). *Social capital: Theory and research*. <https://doi.org/10.4324/9781315129457>
- Litaniawan, F., & Suasana. (2014). Kebijakan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan pada Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong. *Jurnal Academica Fisip Untad*, 6(1), 1203–1212.
- Megasari, D. N., & Purnastuti, L. (2016). Disparitas gender dalam tingkat pengembalian investasi pendidikan di Jawa Barat. *Jurnal Economia*, 12(1), 23–31. <https://doi.org/10.21831/economia.v12i1.8463>
- Nakabashi, L. (2018). Poverty and economic development: Evidence for the Brazilian states. *Economia*, 19(3), 445–458. <https://doi.org/10.1016/j.econ.2018.11.002>
- Nasution, A., Rustiadi, E., Juanda, B., & Hadi, S. (2014). Dampak partisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan terhadap pendapatan rumah tangga pedesaan di Indonesia. *Sosiohumaniora*, 16(3), 222–227. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v16i3.5760>
- Nasution, A., Rustiadi, E., Juanda, B., & Hadi, S. (2015). Two-way causality between social capital and poverty in rural Indonesia. *Asian Social Science*, 11(13), 139–150. <https://doi.org/10.5539/ass.v11n13p139>
- Sachs, J. D. (2012). From millennium development goals to sustainable development goals. *The Lancet Journal*, 379(9832), 2206–2211. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(12\)60685-0](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(12)60685-0)
- Shorrocks, A., & Townsend, P. (1980). *Poverty in the United Kingdom. A survey of household resources and standards of living*. <https://doi.org/10.2307/2231776>
- Susanti, S. (2016). Pengaruh produk domestik regional bruto, pengangguran dan indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan di Jawa Barat dengan menggunakan analisis data panel. *Jurnal Matematika Integratif*, 9(1), 1–18. <https://doi.org/10.24198/jmi.v9.n1.9374.1-18>
- Tenzin, G., Otsuka, K., & Natsuda, K. (2015). Can social capital reduce poverty? A study of rural households in Eastern Bhutan. *Asian Economic Journal*, 29(3), 243–264. <https://doi.org/10.1111/asej.12057>
- Todaro, M., & Smith, S. C. (2012). Economic Development. In *Economic Development* (11th ed.). Pearson.
- United Nations. (2019). The sustainable development goals report 2019. In *United Nations publication issued by the Department of Economic and Social Affairs*.
- Van Rijn, F., Bulte, E., & Adekunle, A. (2012). Social capital and agricultural innovation in Sub-Saharan Africa. *Agricultural Systems*, 108(C), 112–122.

<https://doi.org/10.1016/j.agsy.2011.12.003>

- Videras, J., Owen, A. L., Conover, E., & Wu, S. (2012). The influence of social relationships on pro-environment behaviors. *Journal of Environmental Economics and Management*, 63(1), 1–42. <https://doi.org/10.1016/j.jeem.2011.07.006>
- Weaver, R. D., & Habibov, N. (2012). Social capital, human capital, and economic well-being in the knowledge economy: Results from Canada's general social survey. *Journal of Sociology and Social Welfare*, 39(2), 31–53.
- Wooldridge, J. M. (2015). *Introductory econometrics: A modern approach*. Nelson Education.
- Zang, Y., Zhou, X., & Lei, W. (2017). Social capital and its contingent value in poverty reduction: Evidence from Western China. *World Development*, 93(May), 350–361. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2016.12.034>
- Zhang, S., Anderson, S. G., & Zhan, M. (2011). The differentiated impact of bridging and bonding social capital on economic well-being: An individual level perspective. *Journal of Sociology and Social Welfare*, 38(1), 119–142.

LAMPIRAN

Tabel 3
Operasionalisasi Variabel

No.	Variabel	Definisi
1.	dMiskin: Status Kemiskinan	Status kemiskinan rumah tangga menurut BPS yang dibandingkan dengan Pengeluaran per kapita rumah tangga
2.	Indeks Modal Sosial (IMS)	Modal Sosial agregat
3.	Rata-rata lama Sekolah (LS)	Rata-rata lama sekolah atau pendidikan kepala rumah tangga
4.	Status Kesehatan (dSK)	Kondisi kesehatan kepala rumah tangga
5.	Indeks Saling Percaya (TR)	Indeks saling percaya
6.	Indeks Toleransi (TO)	Indeks toleransi
7.	Indeks Kelompok (GR)	Indeks kelompok
8.	Indeks Jejaring (NT)	Indeks jejaring
9.	Jenis Kelamin (dJK)	Jenis kelamin kepala rumah tangga
10.	Umur (UMR)	Umur kepala rumah tangga
11.	Status Perkawinan (dKWN)	Status perkawinan kepala rumah tangga
12.	Ukuran Rumah Tangga (URT)	Ukuran rumah tangga
13.	Pekerjaan Utama (dKERJA)	Lapangan usaha utama kepala rumah tangga
14.	Status Rumah (dRMH)	Status kepemilikan tempat tinggal
15.	Lama Tinggal (LT)	Jangka waktu tinggal di lokasi
16.	Lokasi Wilayah Tempat Tinggal (dWIL)	Lokasi wilayah tempat tinggal kepala rumah tangga

Tabel 4
Statistik Deskriptif

Variabel	Status kemiskinan rumah tangga			
	Miskin		Tidak miskin	
	Rata-rata	Standar deviasi	Rata-rata	Standar deviasi
Indeks modal sosial	56,62	14,63	58,23	14,51
Indeks Saling Percaya	90,05	16,25	82,12	23,43
Indeks Toleransi	49,08	26,54	55,51	24,04
Indeks Kelompok	23,73	25,69	30,68	30,66
Indeks Jejaring	63,61	30,11	64,61	28,26
Lama sekolah (tahun)	5,73	2,75	7,43	3,63
Status Kesehatan	17%		14%	
Jenis kelamin (1=laki-laki)	84%		85%	
Umur (tahun)	49,29	14,46	49,11	13,91
Status perkawinan (1=kawin)	84%		81%	
Ukuran rumah tangga	4,34	1,62	3,41	1,44
Lapangan usaha utama kepala rumah tangga (1=pertanian)	96%		84%	
Status tempat tinggal (1=milik sendiri)	99%		81%	

Sumber: Badan Pusat Statistik (2014)

Tabel 10
Pendugaan Dampak Komponen Indeks Modal Sosial dan Modal Manusia Terhadap Peluang
Rumah Tangga Menjadi Miskin

Variabel	Variabel tidak bebas: miskin (1=miskin dan 0= tidak miskin)		
	Koef.	Z	Signifikan
Indeks Saling Percaya (TR)	0,017***	5,32	0,000
Indeks Toleransi (TO)	-0,006***	-2,66	0,008
Indeks Kelompok (GR)	-0,003	-1,50	0,134
Indeks Jejaring (NT)	-0,007	-0,83	0,409
Lama sekolah	-0,14***	-6,87	0,000
Status Kesehatan (1=sakit)	0,074	0,49	0,626
Jenis kelamin (1=laki-laki)	-0,767**	-2,53	0,012
Umur	-0,01**	-2,13	0,033
Status perkawinan (1=kawin)	0,446	1,44	0,149
Ukuran rumah tangga	0,458***	12,73	0,000
Pekerjaan utama (1=pertanian)	-0,246	-0,85	0,395
Status rumah (1=milik sendiri)	1,856***	3,15	0,002
Konstanta	-5,168***	-6,37	0,000
Jumlah observasi		5474	
<i>Wald test of exogeneity</i>			
<i>chi²</i>		331,76	
<i>Prob > chi²</i>		0,0000	

Sumber: Data diolah dari Badan Pusat Statistik (2014)

Keterangan: *** signifikan pada tingkat 1%, ** signifikan pada tingkat 5%, * signifikan pada tingkat 10%